

**PERKEMBANGAN PT. POS INDONESIA TAHUN 1961-1995**

**JURNAL**



**Oleh:**  
**Yogyantara Wisnu Aji**  
**10406244010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERKEMBANGAN PT POS INDONESIA TAHUN 1961-1995

Oleh:

Penulis : Yogyantara Wisnu Aji  
Pembimbing : Dr. Aman, M.Pd

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) mengetahui latar belakang proses terbentuknya PT. Pos Indonesia; (2) mengetahui kebijakan PT. Pos Indonesia dari tahun 1961-1995; (3) mengetahui dinamika yang dihadapi dalam perkembangan PT. Pos Indonesia dari tahun 1961-1995.

Metode penelitian menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dimulai awal mula pengelolaan pos modern pada zaman Hindia-Belanda yang membagi menjadi dua bagian Pos dan Telekomunikasi yang disebut PTT. Jawatan PTT yang kemudian digantikan dengan PN Postel menjadi langkah awal bisnis pos dikelola oleh perusahaan negara. Pergantian status perusahaan kembali dilakukan menjadi PN Pos dan Giro. Usaha-usaha untuk mengembangkan bisnis layanan pos kemudian menggantikan PN Pos dan Giro menjadi Perum Pos dan Giro hingga akhirnya pada tahun 1995 berganti menjadi PT Pos Indonesia. (2) Peran dari pemerintah terhadap pelayanan pos di Indonesia dengan pembangunan fasilitas penunjang pos di daerah-daerah. Perluasan jangkauan layanan pos hingga ke daerah-daerah terpencil. Kebijakan yang diambil dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembagkan bisnis pos. Peluncuran produk pos untuk memberikan jenis layanan yang beragam bagi masyarakat. (3) Dinamika yang dihadapi dalam perkembangan pos di Indonesia mencakup beberapa hal baik dari segi pelayanan. Kondisi infrastruktur yang kacau pasca perang kemerdekaan. Terlibatnya organisasi pos ke dalam proyek-proyek politik pemerintah yang berkuasa menjadi hambatan bagi perusahaan. Hingga munculnya pihak swasta yang ikut berbisnis di bidang yang sama.

**Kata kunci:** *Perkembangan, PT Pos Indonesia, 1961-1995*

## THE DEVELOPMENT OF PT POS INDONESIA IN 1961-1995

By:

Author : Yogyantara Wisnu Aji

Supervisor : Dr. Aman, M.Pd

### ABSTRACT

This study aimed to investigate: (1) the background of the process of the establishment of PT Pos Indonesia; (2) the policies of PT Pos Indonesia from 1961-1995; and (3) the dynamics in the development of PT Pos Indonesia from 1961 to 1995.

The method in this thesis was Kuntowijoyo's method. The method included topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography or historical writing. The results of the study are. (1) the presence of a post in the ground water brought by the VOC to the benefit of the trade. The management of the post modern at the time of the Netherlands East Indies split into two sections of posts and telecommunications called PTT. PTT Office which was then replaced with PN Postel in 1961 to become the first step of postal business managed by State enterprises. The changing of the status of the company again conducted into PN postal and Giro. Efforts to develop the business of the postal service then replace PN post and Giro Postal public corporation and became the Giro until finally in 1995 it was renamed into PT Pos Indonesia. (2) the role of the Government's response to the postal service in Indonesia with the construction of supporting facilities of the post in these areas. The expansion of the range of postal services to the remote areas. Post product launch to provide various types of services for the community. (3) the dynamics faced in the development of post in Indonesia includes some things both in terms of service. Infrastruktur conditions of a chaotic post-war independence. Postal organizations involvement into the political projects of the ruling Government poses for the company. Until the advent of private parties who come to do business in the same field.

**Keywords:** *Development, PT Pos Indonesia, 1961-1995*

## PENDAHULUAN

Pos Indonesia memiliki catatan perjalanan yang sangat panjang. Masuknya sistem pos modern ke wilayah Indonesia diperkenalkan oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang mulai menguasai di Nusantara.<sup>1</sup> Peredaran surat dan paket yang dibawa oleh pelancong masa itu hanya diletakan di gedung penginapan kota sehingga setiap orang harus mengecek sendiri surat ataupun paket yang ditujukan kepada mereka. Pos terus dikembangkan pada masa pemerintahan Daendels, karena sarana dan prasarana transportasi diperbaiki, seperti memperlebar dan memperpanjang jalan-jalan di sepanjang pantai utara dari Anyer sampai Panarukan.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang penampungan perusahaan masa Jawatan yang dirubah menjadi Perusahaan Negara (PN).<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang tersebut pula, semua perusahaan yang modal keseluruhannya merupakan kekayaan Negara, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan Negara maupun karena Nasionalisme berubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1961 berdasarkan PP No. 240 Tahun 1961, pemerintah mengubah Jawatan PTT (Pos Telegram dan Telepon) menjadi PN Postel (Pos dan Telekomunikasi).<sup>4</sup> Perubahan ini sekaligus menjadikan Postel menjadi Perusahaan Negara terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut dan mulai diberlakukan pada tanggal 21 Desember 1962.

PN Postel dipisahkan menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1965.<sup>5</sup> Pemisahan ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja masing-masing dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dilanjutkan dengan pergantian status PN Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro pada tahun 1978. Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum, akhirnya

---

<sup>1</sup> Bambang Rudito, Daud Aris Tanudirjo, Didik Pradjoko, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 259.

<sup>2</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2005), hlm 20.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Cahaya Makmur, 1980), hlm. 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965.

pada bulan Juni tahun 1995 Perum Pos dan Giro berubah statusnya menjadi PT Pos Indonesia (Persero).<sup>6</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo ada lima tahap dalam penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.<sup>7</sup>

### **PEMBAHASAN**

Pos Indonesia memiliki catatan perjalanan yang sangat panjang. Masuknya sistem pos modern ke wilayah Indonesia diperkenalkan oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang mulai menguasai di Nusantara.<sup>8</sup> Peredaran surat dan paket yang dibawa oleh pelancong masa itu hanya diletakan di gedung penginapan kota sehingga setiap orang harus mengecek sendiri surat ataupun paket yang ditujukan kepada mereka. Pada zaman Hindia Belanda pos dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pos dan Telekomunikasi atau lebih dikenal dengan sebutan PTT (pos telegram dan telephon). Hal ini berlangsung hingga tahun 1942 saat Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda atas Indonesia.<sup>9</sup> Pada masa pemerintahan Jepang tidak terjadi perkembangan yang signifikan di bidang pos. Pemerintahan Jepang hanya meneruskan pengelolaan pos peninggalan Belanda, banyak fasilitas warisan Belanda yang diambil alih Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang Kantor Pos Telegraf dan Telepon (PTT) dikelola oleh perusahaan swasta dari Jepang yaitu *Kokusai Denki Tsusinkyoku*.<sup>10</sup> Dunia perposan pada masa ini tidak begitu berkembang karena hanya digunakan untuk lalu lintas berita dan komunikasi militer Jepang saja. Namun pemerintahan Jepang saat itu akhirnya membagi wilayah perposan di Indonesia yang bertujuan untuk lebih terorganisir menjadi 3 bagian yaitu PTT

---

<sup>6</sup> [www.posindonesia.co.id/index.php/sejarah-pos/](http://www.posindonesia.co.id/index.php/sejarah-pos/) [Online] diakses pada tanggal 14 September 2016, pukul 01.15 WIB.

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 90.

<sup>8</sup> Bambang Rudito, Daud Aris Tanudirjo, Didik Pradjoko, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 259.

<sup>9</sup> Imam Ahmad, dkk, *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*, (Jakarta: Lspeu Indonesia dan Pos Indonesia, 2011), hlm. 237.

<sup>10</sup> Bambang Rudito, Daud Aris Tanudirjo, Didik Pradjoko, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 259.

Sumatra, PTT Jawa dan PTT Sulawesi. Pada tanggal 12 Maret 1956 diselenggarakan konferensi Kepala Daerah PTT seluruh Indonesia di Bandung.<sup>11</sup> Dalam konferensi ini muncul gagasan perlunya perubahan status PTT dari perusahaan *Indische Bedrijven Wet* (IBW) menjadi *Public Corporation*.<sup>12</sup> Ide ini digagas oleh MR. R. Soekardani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan PTT. Perubahan status ini untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan jasa pos dan sebagai kebutuhan PTT untuk menambah modal usaha perusahaan.

Semakin meningkatnya permintaan jasa layanan pengiriman pos, untuk menunjang kinerja PTT agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1959 tentang jasa Pos.<sup>13</sup> Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pos di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh PTT secara penuh. Jawatan PTT diberikan jaminan untuk melayani permintaan jasa layanan pos dari masyarakat lebih optimal tanpa ada gangguan dari perusahaan lainnya. Keinginan Soekardani selaku Direktur Jenderal PTT saat itu untuk mengubah status Jawatan PTT menjadi Perusahaan Negara akhirnya terjawab dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1960.<sup>14</sup>

Lahirnya UU No. 4 tahun 1959 tentang Pos, memberikan jaminan perlindungan kepada PTT untuk menyelenggarakan tugasnya. Jaminan ini termasuk monopoli pos dikelola secara khusus oleh PTT dimana pihak lain tidak bisa ikut serta menjalankan jasa dan memungut biaya yang sama saat itu.<sup>15</sup> Sebagai pelaksana Undang-undang sebelumnya pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (P.N. Postel) pada tanggal 21 Desember 1961.<sup>16</sup> Perubahan status PTT menjadi P.N. Postel ini juga

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Cahaya Makmur, 1980), hlm. 13.

<sup>12</sup> Imam Ahmad, dkk, *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*, (Jakarta: Lspeu Indonesia), 2011, hlm. 279.

<sup>13</sup> Imam Ahmad, dkk, *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*, (Jakarta: Lspeu Indonesia, 2009), hlm. 279.

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Cahaya Makmur, 1980), hlm. 13.

<sup>15</sup> Pihak lain di luar Djawatan PTT yang boleh menjalankan pengiriman pos ditegaskan dalam Pasal 2, PP No. 26/1959 tentang Pos Dalam Negeri.

membuat segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan menjadi milik P.N. Postel.

Terlibatnya PN Postel dalam beberapa kepentingan politik yang ada berdampak besar kepada perusahaan. Faktor-faktor internal perusahaan juga memberikan efek negatif terhadap kinerja perusahaan dalam melayani permintaan jasa dari para konsumen. Sementara dengan keterbatasan moda angkutan pos saat itu juga berpengaruh banyak terutama pada distribusi hantaran pos. Meningkatnya beban belanja, harga barang, dan kenaikan biaya angkut membuat kondisi semakin buruk. Kenaikan tarif pos yang diberlakukan saat itu belum bisa mendongkrak laba perusahaan yang juga dibebani oleh biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pos. Puncaknya pada tahun 1965 PN Postel mengalami saldo negatif yang mencapai lebih dari 5 miliar rupiah.<sup>17</sup>

PN Postel yang awalnya untuk pelayanan terhadap pemerintahan dan urusan negara harus terpecah dengan melayani jasa pos dan giro ini. Usaha-usaha untuk memaksimalkan peranan PN Postel mulai digencarkan beberapa Kepala Pos di daerah-daerah. Pemisahan layanan Pos dan Telekomunikasi dengan layanan Pos dan Giro semakin besar dilakukan yang bertujuan agar peran PN Postel lebih efisien. Gagasan pemecahan PN Postel akhirnya disetujui yang kemudian dibagi menjadi dua perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan bidang pos dan giro dan perusahaan negara bidang telekomunikasi. Pemisahan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 yang menetapkan tentang Pendirian Perusahaan Pos dan Giro yang.<sup>18</sup>

PN Postel yang saat itu mewariskan hutang yang cukup besar menjadi beban bagi PN Pos dan Giro dalam mengelola perusahaan. Kondisi ini membuat PN Pos dan Giro harus segera bergerak untuk mengurangi defisit perusahaan. Pemerintah Orde Baru juga menuntut Perusahaan Negara untuk bisa mandiri dalam mengelola keuangan perusahaan. Tidak adanya subsidi dari pemerintah menjadikan PN Pos dan Giro harus mempunyai *balance budget* dan berswasembada dalam anggaran belanja perusahaan.<sup>19</sup> Pengurangan anggaran pada belanja perusahaan terus dilakukan hingga pulihnya keuangan perusahaan.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961.

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Pra Republik*, (Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980), hlm. 142.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Cahaya Makmur, 1980), hlm. 13.

<sup>19</sup> *Bulletin Kantor Pusat PN Pos dan Giro*, Tahun I No. 10-11-12, (Oktober-Desember 1967), hlm. 9.

Semakin maraknya perusahaan swasta pesaing yang bergerak di bidang yang sama membuat PN Pos dan Giro terus melakukan pengembangan layanan dan produknya. Peluncuran layanan surat kilat secara resmi mulai dilakukan pada 1 Juni 1996 dengan mengandalkan jaringan pos yang sudah ada. Pengenalan Dinas Pos Kilat yang mulai dilakukan mendapat respon yang baik dengan meningkatnya permintaan layanan ekspres dari masyarakat. Layanan pos kilat ini diharapkan dapat menambah pendapatan dari biaya antar dan prangko yang lebih mahal dari layanan pos lainnya. Perluasan layanan pos kilat ini terus dilakukan dari kota-kota besar hingga kabupaten yang jumlahnya telah mencapai 33 trayek pos kilat.<sup>20</sup>

Peningkatan laba perusahaan, kinerja para karyawan yang semakin solid menjadi prestasi tersendiri bagi perusahaan. Mulai tahun 1968 sampai tahun 1971 PN Pos dan Giro berhasil mendapatkan laba sebesar Rp. 17 juta.<sup>21</sup> Pencapaian ini direspon positif oleh pemerintah yang akhirnya mengganti status PN Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan ini menjadi hadiah bagi perusahaan sekaligus tantangan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Perum Pos dan Giro harus bisa mengelola perusahaan tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah lagi. Terlepas dari mendapatkan laba perusahaan Perum Pos dan Giro juga mendapat tugas bisa menjangkau layanan pos hingga ke daerah-daerah terpencil.

Kebijakan politik dan ekonomi yang dilakukan di masa Orde Baru juga berpengaruh terhadap perusahaan negara yang sudah ada. Meningkatnya inflasi saat itu berdampak terhadap permodalan perusahaan-perusahaan negara banyak yang dievaluasi. Masa Orde Baru mengharuskan perusahaan negara untuk mulai mencari modal perusahaan sendiri. Presiden Soeharto saat itu telah menginstruksikan untuk penyederhanaan pada perusahaan negara dan lebih aktif lagi untuk menarik modal asing.<sup>22</sup> Pentingnya bisnis layanan pos ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah yang menganggap jasa pos juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik hingga laju pembangunan negara. Di tengah situasi politik ekonomi yang sedang labil PN Pos dan Giro diharapkan dapat menyerap pendapatan kas negara lebih optimal. Terlebih pada masa ini sedang terjadi pergantian era pemerintahan dari masa orde lama ke orde baru. Keberhasilan mengembangkan jasa perposan di Indonesia dianggap sebuah pembuktian untuk pemerintah bahwa PN Pos dan Giro berhasil mengembangkan jaringan pos di seluruh wilayah

---

<sup>20</sup> Soekandar, "Dinas Pos Kilat Khusus" dalam *MerpatiPos*, No. 7 Th. 7 Juli 1973, hlm. 18.

<sup>21</sup> Imam Ahmad, dkk, *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*, (Jakarta: Lspeu Indonesia dan Pos Indonesia, 2011), hlm. 351.

<sup>22</sup> Departemen Penerangan, *Pokok-pokok Kebidjaksanaan Kabinet Ampera dalam Tahap Konsolidasi*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967), hlm. 11.

Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 akhirnya pemerintah mengganti status PN Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Kebijakan Repelita yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu Perum Pos dan Giro dalam pengembangan perusahaan. Pembangunan fasilitas-fasilitas dinas pos terus dilakukan untuk memperluas jaringan Pos dan Giro agar dapat melayani masyarakat di daerah-daerah. Pembangunan gedung-gedung pos, penyempurnaan sarana angkutan pengangkut layanan pos semakin digencarkan untuk menunjang kinerja perusahaan. Meningkatnya kegiatan perposan di Indonesia dan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi, akhirnya pada tahun 1984 dikeluarkan undang-undang yang mengatur lebih rinci tentang layanan jasa pos di Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1984 ini mengatur tentang pembinaan dan penyelenggaraan pos di Indonesia agar lebih terperinci.<sup>23</sup>

Monopoli penyelenggaraan pos di Indonesia yang dikuasai oleh Perum Pos dan Giro tidak semerta berjalan mulus. Banyak perusahaan swasta yang tergoda untuk menjalankan bisnis yang sama. Hal ini muncul wacana untuk merubah peraturan tentang pengelola bisnis pos di Indonesia. Pemerintah saat itu mulai membatasi monopoli pos dengan memberikan kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Pembatasan kepada Perum Pos dan Giro dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk menjalankan bisnis yang sama. Perusahaan berhak untuk membuka jasa penitipan dan pengiriman dokumen, saham, akta dan laporan perusahaan tanpa harus melalui Perum Pos dan Giro.<sup>24</sup> Perusahaan swasta ini banyak mengincar konsumen di kota-kota besar dan perkantoran untuk melayani kiriman paket dokumen perusahaan. Hingga tahun 1994 perusahaan swasta yang terdaftar di Ditjen Postel telah mencapai 2.125 kantor dan hampir menguasai 83% pasar jasa paket di Indonesia.<sup>25</sup> Namun untuk warkat pos, surat dan kartu pos, serta benda pos yang lain masih dikuasai oleh Perum Pos dan Giro.

Pada tahun 1992 Perum Pos dan Giro dipimpin oleh Marsoedi yang langsung merancang strategi agar dapat bersaing dalam perkembangan bisnis saat itu. Tri Strategi Pembangunan Pos dan Giro menjadi perhatian Marsoedi yang meliputi, peningkatan mutu layanan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, dan perluasan jaringan.<sup>26</sup> Langkah ini diambil agar masyarakat di

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

<sup>24</sup> Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, *50 Tahun Peranan Pos dan Telekomunikasi*, (Jakarta, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, 1996), hlm 32.

<sup>25</sup> Imam Ahmad, dkk, *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*, (Jakarta, Lspeu Indonesia, 2011), hlm. 394.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 400.

berbagai daerah di Indonesia bertahan dan semakin percaya terhadap layanan Perum Pos dan Giro. Keberhasilan Perum Pos dan Giro menjalankan perusahaan dengan usahanya sendiri tanpa membebani dari biaya dari pemerintah semakin memicu semangat perusahaan untuk lebih bergerak maju.

Pembubaran Perum Pos dan Giro yang digantikan dengan perusahaan perseroan beralih pula hak dan kewajiban perusahaan. Kekayaan dan para pegawai Perum Pos dan Giro ikut serta masuk dalam PT Pos Indonesia. Perubahan prinsip persero dengan perum berdampak juga kepada nasib karyawan perusahaan. Selama berbentuk Perum pegawai Perum Pos dan Giro merupakan pegawai negeri dan berhak diberikan hak pensiun.<sup>27</sup> PT Pos Indonesia (Persero) wajib membayar dana pensiun bagi mantan karyawan perum yang kemudian statusnya menjadi pegawai swasta biasa. Pendirian PT Pos Indonesia berlaku mulai tanggal 20 Juni 1995 menggantikan Perum Pos dan Giro sebagai penyelenggara bisnis pos di Indonesia.<sup>28</sup> Pencapaian ini bukan hasil akhir bagi perusahaan untuk terus mengembangkan sayap-sayap perusahaan menuju lebih profesional. Sampai tahun 1995 PT Pos Indonesia sudah memiliki unit pelayanan pos sebanyak 4.525 buah kantor pos.<sup>29</sup>

Pada tahun 1995 akhirnya pemerintah menyetujui perubahan status terhadap Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero). Keputusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>30</sup> Melalui peraturan ini Perum Pos dan Giro kemudian berganti nama menjadi PT Pos Indonesia (Persero) dan segala hak dan kewajiban serta kekayaan perusahaan menjadi milik PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia (Persero) kini sudah memiliki jaringan di 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, di hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, serta memiliki 3.700 Kantor Pos *online* di beberapa kota besar.<sup>31</sup> Sekarang ini PT. Pos Indonesia sedang menghadapi era perkembangan teknologi yang berkembang secara pesat. PT. Pos Indonesia terus bergerak untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 tentang Perum Pos dan Giro.

<sup>28</sup> Disahkan melalui Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995.

<sup>29</sup> Bagian Statistik Perhubungan, *Statistik Pos Indonesia*, (Jakarta: Percetakan BPS, 1995), hlm. 9.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995.

<sup>31</sup> Laporan Tahunan 2014, (Pos Indonesia, 2014), hlm. 36.

layanan jasa perposan di Indonesia dengan membangun citra baru Pos Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Arsip :**

Berkas salinan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi Oleh Presiden Republik Indonesia.

Berkas salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Pos dan Giro Oleh Presiden Republik Indonesia.

Berkas salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos Oleh Presiden Republik Indonesia.

Berkas salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) Oleh Presiden Republik Indonesia.

##### **Buku**

Bambang Rudito, Daud Aris Tanudirjo, Didik Pradjoko. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. 1996. *50 Tahun Peranan Pos dan Telekomunikasi*. Jakarta, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Cahaya Makmur.

Imam Ahmad, dkk. 2011. *Melayani Rakyat Menjaga Negara "Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia"*. Jakarta: Lspeu Indonesia dan Pos Indonesia.

Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Pramoedya Ananta Toer. 2005. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.

PT. Pos Indonesia (Persero). 2014. *Pos Indonesia - Laporan Tahunan*. Bandung: PT. Pos Indonesia.

##### **Internet :**

[www.posindonesia.co.id/index.php/sejarah-pos/](http://www.posindonesia.co.id/index.php/sejarah-pos/) [Online] diakses pada tanggal 14 September 2016, pukul 01.15 WIB.

Penguji Utama



Saefur Rochmat, S.Pd., M.Ir., Ph.d  
NIP. 19681122 199403 1 001

Yogyakarta, Agustus 2017

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Dr. Aman, M.Pd  
NIP. 19741015 200312 1 001